# STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 KOTA PALEMBANG

## SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi**

**Konsentrasi: Hubungan Masyarakat**


**Disusun Oleh:**

**M. Mukhlizardi Putra**

**07031381419086**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Palembang**

# SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

**Oleh**

**M. Mukhlizardi Putra**
**07031381419086**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2019**

**Pembimbing I**

**Dr. Retna Mahriani, M.Si**
**NIP. 196012091989122001**

**Pembimbing II**

**Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si**
**NIP. 198411052008121003**

**Telah dinyatakan memenuhi syarat**
**Pada tanggal, Agustus 2019**
**Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi**
**Universitas Sriwijaya**

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**
**NIP. 197905012002121005**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

1. Skripsi yang berjudul "Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2019" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yantg pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia meneirma sanksi, baik Skripsi beserta gelar Sarjana saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim promoter / pembimbing sebagai *author* dan program studi Ilmu Komunikasi universitas Sriwijaya sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Palembang, September 2019

M. Mukhlizardi Putra
NIM 0703138419086

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto:**

***‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’***

**(HR.Turmudzi)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda Fitriadi Sofyan dan Ibunda Lisdawati.
2. Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Almamaterku Universitas Sriwijaya.

## *ABSTRACT*

*The study discusses how the political communication strategy of a party, especially in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PKS Palembang) in the city of Palembang. This study uses descriptive qualitative research methods with the aim to describe all conditions, situations and social phenomena that occur in society. Data collection methods used are in-depth interviews, and observations. In this study, researchers want to identify and describe the things that occur in political communication strategies related to the elements of communication in the dimensions of political communicators, political messages, channels or media, targets or targets, and influences or effects. The results of this study in carrying out the PKS Palembang political communication strategy are quite good, but in some sectors it still needs to be improved, namely in the delivery of communication patterns.*



*Keywords: Political Communication Strategy, Political Parties, PDI-Struggle, Legislative Election*


| *Thesis Adviser I* | *Thesis Adviser II* |
|---|---|
| Dr. Hj. Retna Mahriani, M.Si | Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si |
| NIP. 196012091989122001 | NIP. 198411052008121003 |

Palembang, 12 Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

# ABSTRAK

Penelitian membahas bagaimana strategi komunikasi politik suatu partai, khususnya pada Partai Keadilan Sejahtera di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan semua kondisi, situasi dan fenomena sosial apa yang terjadi di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, dan observasi. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi dan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi pada strategi komunikasi politik terkait dengan unsur-unsur komunikasi pada dimensi komunikator politik, pesan politik, saluran atau media, sasaran atau target, dan pengaruh atau efek. Hasil Penelitian ini dalam melakukan strategi komunikasi politik PKS Palembang cukup baik, namun di beberapa sektor masih perlu ditingkatkan yaitu dalam penyampaian pola komunikasi.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi Politik, Partai Politik, PKS Palembang, Pemilu Legislatif

Pembimbing I

Dr. Hj. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

Pembimbing II

Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
NIP. 198411052008121003

Palembang, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat membuat skripsi dengan baik untuk melengkapi syarat wajib yang harus ditempuh dalam program studi.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis tentu mendapatkan hambatan dan masalah, baik secara teknis maupun non teknis. Namun, berkat usaha, semangat, kerja keras, do'a serta dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing baik secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Palembang".

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari pihak terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi.
4. Ibu Dr. Hj. Retna Mahriani, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II saya yang telah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu dosen FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat kepada saya.
6. Bapak M. Ridwan, Bapak Jumono dan Bapak Eka Erfani serta pimpinan dan tokoh lainnya di Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang yang telah bersedia untuk diwawancarai mengenai strategi komunikasi politik.
7. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, do'a, motivasi, nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat dan seluruh teman-teman saya tercinta yang telah memberikan semangat, dorongan, motivasi, inspirasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.

Pada penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menunjang kesempurnaan hasil penelitian selanjutnya di masa akan datang. Semoga melalui skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

M. Mukhlizardi Putra
NIM 0703138419086

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI ..... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

*ABSTRACT* ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TABEL ..... xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 10

1.3 Tujuan Penelitian ..... 10

1.4 Manfaat Penelitian ..... 10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Landasan Teori ..... 12

2.1.1. Komunikasi ..... 12

2.1.2. Komunikasi Politik ..... 14

2.1.3. Unsur-Unsur Komunikasi Politik ..... 18

2.1.4. Beberapa Teori yang digunakan dalam penelitian ini..... 22

2.2 Kerangka Teori ..... 27

2.3 Kerangka Pemikiran..... 28

2.4 Alur Pikir ..... 29

2.5 Hipotesis Deskriptif ..... 30

2.6 Penelitian Terdahulu ..... 30

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Desain Penelitian ..... 33

3.2 Definisi Konsep ..... 34

3.3 Fokus Penelitian..... 35

3.4 Unit Analisis ..... 35

3.5 Kriteria Informants & Informants Pendukung..... 36

3.5.1 Key Informants ..... 36

3.5.2 Informants Pendukung ..... 36

3.6 Data dan Sumber Data ..... 36

3.7 Teknik Pengumpulan Data..... 37

3.7.1 Wawancara Mendalam (*In Depth Interview)*..... 38

3.7.2 Observasi..... 39

3.8 Teknik Keabsahan Data ..... 39

3.9 Teknik Analisis Data..... 40

3.10 Sistematika Penulisan ..... 43

**BAB IV GAMBARAN UMUM**

4.1 Sejarah Partai Keadilan Sejahtera ..... 43

4.2 Dasar Pemikiran..... 45

4.3 Tujuan ..... 46

4.4 Visi dan Misi ..... 47
4.5 Prinsip Kebijakan ..... 48
4.6 Kebijakan Dasar ..... 49
4.7 Struktur Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang ..... 55

**BAB V HASIL & ANALISIS**

5.1 Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera ..... 56
5.1.1 Komunikator Politik ..... 57
5.1.2 Pesan Politik ..... 62
5.1.3 Saluran atau Media ..... 64
5.1.4 Sasaran atau Target ..... 66
5.1.5 Efek Komunikasi Politik ..... 67
5.3 Proses Komunikasi Politik ..... 75
5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Politik ..... 77
5.4 Tujuan Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera ..... 81
5.5 Dampak Penerapan Strategi Komunikasi ..... 82

**BAB VI KESIMPULAN & SARAN**

6.1 Kesimpulan ..... 84
6.2 Saran ..... 84
DAFTAR PUSTAKA ..... 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 87

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu ..... 30

Tabel 3.1 : Dimensi Strategi Komunikasi Politik ..... 35

Tabel 4.1 : Struktur Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang ..... 55

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Komunikasi merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini didasari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan sesamanya. Interaksi atau komunikasi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok pasti akan selalu dilakukan setiap hari. Seperti rantai manusia satu dengan yang lainnya terhubung melalui rantai yang dinamakan komunikasi. Dari komunikasi orang tahu sesutu informasi, makin banyak orang tahu sesuatu maka dia semakin dianggap memiliki informasi, dan kalau dia menguasai informasi maka dia menguasai dunia (Liliweri, 2010-59).

Tidak terlewatkan juga partai politik. Partai politik juga memiliki suatu fungsi ini. Menurut Leo Agustino (Liliweri, 2010-56) setiap partai memiliki fungsi komunikasi politik. Lewat komunikasi yang terjalin ini diharapkan partai mampu menjangkau semua simpatisan atau yang masih buta politik agar tidak hanyu dalam gelombang apatis politik yang semakin besar. Namun, yang terjadi malah sebaliknya banyak sekali partai politik di negeri ini, negeri yang berjuluk Zamrud khatulistiwa, melakukan komunikasi yang baik dan benar serta efisien. Banyak partai politik memainkan cara pintas dalam melakukan komunikasi politik ini. Banyak diantara cara yang dipilih adalah politik pragmantis. Yaitu cara-cara yang dianggap cepat seperti uang, sembako, dll saat kampanye menjelang pemilihan,atau juga komunikasi yang menjatuhkan lawan demi meraih simpati

publik. Padahal hal itu mampu menimbulkan pencabulan politik bagi *audience* atau massa yang mengikuti kampanye (Liliweri, 2010-73).

Komunikasi Politik yang dilakukan oleh suatu parpol sangat berguna bagi kemenangan parpol itu sendiri. Mengingat salah satu elemen dari komunikasi adalah menunjukkan identitas diri, maka komunikasi yang benar akan mengenalkan kepada orang lain identitas diri dalam hal ini adalah identitas partai politik kepada massa yang hadir. Dari identitas itu partai politik dapat membuat simpati dari rakyat yang berujung kemenangan (Nimmo, 2006-109).

Tahun 2019 akan menjadi babak baru bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum (PEMILU). Lebih dari 187 juta pemilih baik di dalam negeri atau luar negeri untuk pertama kalinya akan memilih secara serentak calon anggota legislatif (PILEG) dan capres-cawapres (PILPRES). Dengan adanya keserentakan, Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan Pemilu tahun 2014. Mulai dari penyelenggaraan, jumlah parpol peserta pemilu, hingga metode penghitungan suara parpol. Perbedaan itu ditandakan dengan digabungkannya UU Pileg, UU Pilpres, dan UU Penyelenggaraan Pemilu menjadi hanya UU Pemilu.

Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yakni keserentakan. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014, sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya atau pada 9 Juli 2014. Pada Pemilu tahun 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada Rabu,

17 April 2019. Pemilu secara serentak ini dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg alias tidak serentak. (kumparan.com, 2018).

Dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, para pemilih harus membawa 5 surat suara sekaligus ke bilik suara untuk dicoblos. Lima surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.

Jumlah partai politik (parpol) yang berlaga di Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014 juga berbeda. Pada Pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional itu yakni Partai NasDem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Adapun, 3 parpol lokal Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Sedangkan pada Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Tambahan 4 parpol di tingkat nasional itu merupakan parpol baru yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo. Sementara itu parpol lokal Aceh yang bertahan ikut Pemilu 2019 hanya Partai Aceh, sedangkan tiga lainnya baru yakni Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh.

*Presidential Threshold* ambang atau batas syarat parpol bisa mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2019 juga menjadi sesuatu yang baru. Pada Pemilu 2014, *Presidential Threshold* menggunakan hasil Pileg tiga bulan sebelumnya. Ketentuannya parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Sedangkan pada Pemilu 2019, karena penyelenggaraannya serentak, disepakati *Presidential Threshold* yang digunakan berasal dari hasil Pileg 2014. Besaran *Presidential Threshold* tidak berubah dari Pemilu 2014. Isu *Presidential Threshold* ini sempat menimbulkan pro kontra hingga membuat 4 fraksi di DPR yakni PAN, Gerindra, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera *walk out* saat rapat paripurna pengesahan UU Pemilu. Keempat parpol itu beralasan penerapan *Presidential Threshold* pada Pemilu 2019 tidak tepat, sebab bagaimana mungkin bisa menentukan *Presidential Threshold* 20 persen sedangkan belum ada hasil pemilu legislatif. Di 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar di hari yang sama. Sementara PT baru bisa diketahui setelah pemilu legislatif.

Penolakan terhadap *Presidential Threshold* itu juga membuat beberapa pihak menggugat ketentuan yang termaktub di UU Pemilu tersebut ke MK. Meskipun pada akhirnya MK menolak gugatan itu dan menyatakan ambang batas presiden itu konstitusional. Pada Pemilu 2019, persaingan parpol untuk lolos ke DPR akan semakin sengit. Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang harus dicapai parpol untuk menempatkan kadernya di DPR naik menjadi 4 persen pada Pemilu 2019. Angka itu naik 0,5 persen apabila dibandingkan pada Pileg 2014 sebesar 3,5 persen. Angka ambang batas parlemen itu selalu naik di

setiap pemilu. Pada Pileg 2004 belum ada ketentuan ambang batas parlemen, ketentuan itu baru digunakan pada Pileg 2019 sebesar 2,5 persen dan selanjutnya 3,5 persen pada Pileg 2014. Salah satu tujuan digunakannya ambang batas parlemen yakni untuk menciptakan sistem multipartai yang sederhana. Adanya ambang batas itu membuat PBB dan PKPI tak lolos pada Pemilu 2014 karena perolehan suaranya tak mencapai 3,5 persen. PBB hanya memperoleh 1,46 persen sedangkan PKPI hanya 0,91 persen.

Metode penghitungan jumlah kursi pada Pemilu 2019 juga berbeda dengan Pemilu 2014. Jika Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) atau *Quote Harre* dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini menggunakan teknik *Sainte Lague* untuk menghitung suara. Metode tersebut diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Perancis bernama Andre Sainte Lague pada tahun 1910. Caranya, parpol yang memenuhi ambang batas parlemen empat persen suaranya akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya. Hal itu diatur dalam Pasal 415 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya.

Daerah pemilihan (dapil) yang menjadi area bagi para caleg untuk berebut kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019 juga berubah. Jumlah dapil pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan jumlah

dapil pada Pemilu 2014. Dalam Pemilu 2019, KPU menetapkan 80 dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR. Jumlah itu meningkat dari Pemilu 2014 lalu yang hanya 77 dapil di seluruh Indonesia. Penambahan dapil itu terjadi di tiga wilayah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Adanya penambahan dapil itu otomatis juga menambah jumlah kursi DPR yang akan diperebutkan oleh para caleg. Pada Pemilu 2019 mendatang, ada 575 kursi yang diperebutkan. Sementara pada Pemilu 2014, kursi di DPR yang diperebutkan yakni 560. Perubahan dapil dan kursi itu tidak hanya di tingkat DPR. Jumlah dapil untuk perebutan kursi DPRD Provinsi juga berubah. Pada Pemilu 2019, jumlah dapil yang ditetapkan KPU yakni 272 dapil, naik dari Pemilu 2014 yang hanya 259 dapil.

Peningkatan jumlah dapil DPRD Provinsi itu juga membuat jumlah kursi yang akan diperebutkan di 34 provinsi di seluruh Indonesia bertambah menjadi 2.207 kursi. Pada Pemilu 2014, total kursi DPRD yang diperebutkan sebanyak 2.112. Sementara itu untuk jumlah dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, KPU menetapkan sebanyak 2.206 dapil pada Pemilu 2019. Jumlah itu meningkat dibandingkan Pemilu 2014 lalu yang hanya 2.102 dapil. Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang diperebutkan juga meningkat, dari 16.895 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 17.610 kursi pada Pemilu 2019.

Pemilihan umum legislatif 2019 yang dilaksanakan di Kota Palembang tengah diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih. Segala strategi,

taktik, dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk memenangkan pemilu ini. Semua partai politik menerapkan strategi komunikasi politik yang berbeda-beda. Strategi komunikasi politik merupakan bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya (Abdullah, 2008-99). Dari proses pemilu 2019 secara umum Pemilu Legislatif di Kota Palembang yang diikuti 16 Partai Politik berlangsung kondusif.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai yang ada dalam jajaran partai politik didalam pemilihan umum di Kota Palembang tahun 2019. Sebagai salah satu partai politik islam yang mempunyai nama besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mempunyai peranan dalam mengkomunikasikan politik kepada simpatisan dan masyarakat, bergerak dalam lapangan politik untuk ikut mengatur ketatanegaraan. Maka strategi komunikasi politik yang digunakan harus tepat sasaran sehingga perolehan suara yang didapat akan sesuai dengan yang diinginkan partai dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019. Dengan menggunakan berbagai cara partai dan caleg Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan program-program kerja kepada sasarannya yaitu masyarakat, dengan berkampanye salah satu strategi partai untuk menarik masa dan simpatisan, melalui media masa serta turun langsung merupakan strategi komunikasi yang sering dilakukan baik partai maupun caleg yang berpartisipasi

dalam pemilihan legislatif tersebut. Dengan strategi tersebut diharapkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.

Ada tiga alasan utama mengapa penulis ingin melakukan penelitian ini dan juga terkait atas pemilihan judul. Ketiga alasan tersebut sebagai berikut :

1 Kehadiran PKS-bagi sebagian orang- telah memberi secercah harapan bagi rakyat Indonesia bahwa ada partai yang bermoral (bersih), anti korupsi, dan peduli pada rakyat. PKS juga dinilai mampu menumbuhkan kembali kepercayaan orang pada partai Islam. Indikatornya adalah meningkatnya jumlah konstituten mereka di beberapa Pemilu.

2 Pada pemilu pascareformasi, PKS menunjukkan grafik raihan suara yang cenderung naik. Pada Pemilu 1999, saat masih bernama Partai Keadilan (PK), parpol ini meraih 1,36 persen suara nasional dan 7 kursi di DPR. Setelah berganti nama menjadi PKS dan ikut Pemilu 2004, partai kader ini mendapat 7,34 persen suara dan mendapat 45 kursi di DPR. Pemilu 2009, PKS meraih 7,88 persen suara dan 57 kursi DPR. Sementara pada Pileg 2014, PKS mengalami penurunan suara dengan raihan 6,79 persen dan 40 kursi di DPR. Pada Pileg 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKS berada di posisi keenam dengan 11.493.663 suara (8,21 persen). (kompas.com)

3 PKS Kota Palembang pada Pileg 2019 ditingkat DPRD kota Palembang, raihan kursi yang didapat dipastikan melejit dibanding Pileg 2014 lalu. Pada pemilu 2014, PKS hanya berhasil membawa 3 kadernya duduk di DPRD Palembang, Namun pada pemilu 2019 ini, PKS memastikan ada 5

kadernya yang akan duduk di kursi legislatif kota Palembang. (tribunsumsel.com). Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota Palembang pada Pemilu 2019 sebesar 64.570 atau 7,47 %. (KPU Palembang).

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang pada Pemilu 2019.

**Gambar 1.**
**Hasil Pemilu 2019 Kota Palembang**

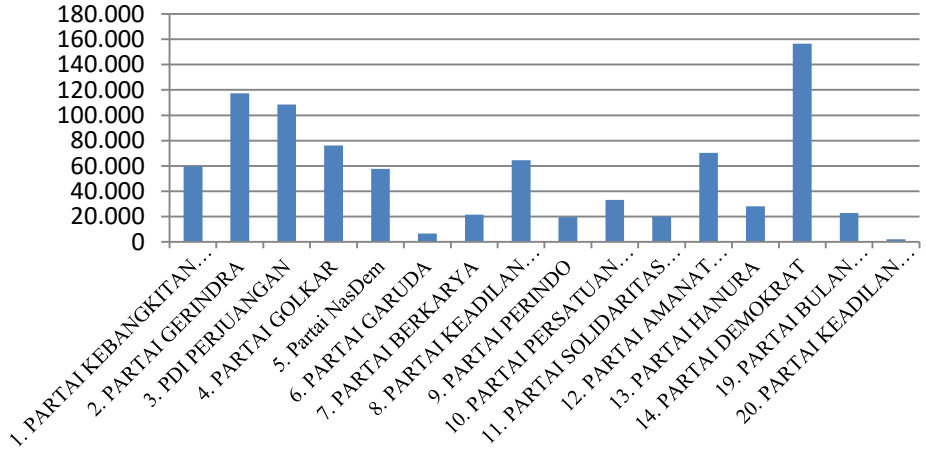


Perolehan suara partai ini menjadi alasan mengapa penelitian ini memilih PKS sebagai studi kasus penelitian tentang strategi komunikasi politik partai politik dalam pemilu legislatif 2019. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa mempertahan eksistensinyadi setiap Pemilu, bahkan pada Pemilu 2019 ini mengalami peningkatan. Kenyataan ini juga menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban, kiranya strategi apa yang di pakai oleh PKS dalam pemilu legislatif 2019.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penulis mengangkat rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang pada Pemilu serentak 2019 ?
2. Apa dampak dari penerapan strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang terhadap perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2019 ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang pada Pemilu serentak 2019
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang terhadap perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2019.

## 1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi politik yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi para pengurus dan kader partai politik secara umum dan khususnya Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang serta masyarakat luas dalam menentukan kebijakan dan strategi komunikasi pada pemilu-pemilu selanjutnya.

3. Manfaat bagi peneliti

   Manfaat bagi peneliti, peneliti dapat mendiskripsikan strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Palembang serta sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas wawasan mengenai Ilmu Komunikasi khususnya di bidang komunikasi politik.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**


Abdullah, Zein. *Strategi komunikasi Politik dan Penerapannya.* Simbiosa Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi, 2008

Asep Saiful Muhtadi. *Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008

Agus Sudibyo. *Politik Media dan Pertarungan Wacana.* Yogyakarta: LKiS, Yogyakarta, 2001

Antar Venus. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye komunikasi.* Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2019

Akhmad Danial, *Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, LkiS, Yogyakarta, 2019

Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori, Dan Strategi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019

Fajar Junaidi, *Komunikasi Politik : Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2019

Hasrullah, *Megawati dalam Tanggapan Pers*, LkiS, Yogyakarta, 2001

Harsono Suwandi, *Perencanaan Public Relation*, 2000

Jalaludin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986

Liliweri, Alo. *Strategi Komunikasi Masyarakat*.Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang. 2010.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006

Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif.* (Edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta, 1992

Mulyana. Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004

Nimmo, Dan. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006

Onong U. Effendy, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2019

Sutopo, H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2006

Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

**Jurnal :**

Akhirullah Aminullah, *Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilu Legislatif 2019*

Andika Hendra Mustaqim, *Strategi Komunikasi Politik Digital Pasca-Kebenaran*

Harold Y. Pattiasina, *Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilu 2014*

**Sumber lain :**

https://palembang.tribunnews.com/2019/05/03/kursi-ketua-dprd-kota-palembang-bakal-diduduki-kader-dari-partai-demokrat-ini-penyebabnya?page=2

https://maklumatnews.com/2019/04/26/PKS_Palembang-dipresiksi-tak-lagi-dapat-kursi-ketua-dprd-palembang/#ixzz5rMHgTGKX

https://pakarkomunikasi.com/strategi-komunikasi-politik